



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

Laporan Keuangan T.A. 2024 Audited

BAGIAN ANGGARAN 065



**LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
AUDITED
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta Selatan 12190

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, **09 MAY 2025**

Menteri Investasi dan Hilirisasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosan Perkasa Roeslani

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	33
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	60
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	70
F. Pengungkapan Penting Lainnya	73
VI. Lampiran dan Daftar	77



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM
(AUDITED)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (*Audited*) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan. Semua Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, **06 MAY 2025**

Inspektur



Kukuh Agung Pribadi, S.E.

NIP. 196808171988031003



MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal *Audited* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 09 MAY 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosan Perkasa Roeslani

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp8.442.627.534,00 dari estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.147.741.865.665,00 atau mencapai 93,37 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.229.295.942.000,00.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.390.207.300.749,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp28.356.435.940,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.238.134.893.484,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp123.715.971.325,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp78.257.257.658,00 dan Rp2.311.950.043.091,00.

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp798.282.016,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.123.797.578.172,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(1.122.999.296.156,00).

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp3.353.411.674,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(1.119.645.884.482,00).

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp2.288.895.571.531,00, dikurangi dengan Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp(1.119.645.884.482,00), ditambah dengan Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp(736.047.089,00) dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp1.143.436.403.131,00 sehingga nilai Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.311.950.043.091,00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	8.442.627.534	--	9.804.636.242
JUMLAH PENDAPATAN		-	8.442.627.534	--	9.804.636.242
BELANJA	B.2.				
Belanja Rupiah Murni					
Belanja Pegawai	B.3	251.203.078.000	241.176.060.270	96,01	141.917.304.417
Belanja Barang	B.4	867.300.733.000	814.685.758.812	93,93	893.828.961.599
Belanja Modal	B.5	110.792.131.000	91.880.046.583	82,93	59.205.388.245
JUMLAH BELANJA		1.229.295.942.000	1.147.741.865.665	93,37	1.094.951.654.261

Jakarta, 09 MAY 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosan Perkasa Roeslani

N E R A C A

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	104.475.690	678.341.646
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	503.240.777	598.593.012
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3	26.479.577.654	7.188.792.542
Piutang Bukan Pajak	C.4	7.090.354	20.121.514
Persediaan	C.5	1.262.051.465	1.319.069.413
Jumlah Aset Lancar		28.356.435.940	9.804.918.127
ASET TETAP			
Tanah	C.6	1.959.546.919.000	1.959.546.919.000
Peralatan dan Mesin	C.7	380.253.431.212	338.922.462.087
Gedung dan Bangunan	C.8	294.993.064.951	286.973.823.275
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.9	9.022.115.183	9.022.115.183
Aset Tetap Lainnya	C.10	1.510.762.849	1.447.207.849
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(407.191.399.711)	(363.259.337.377)
Jumlah Aset Tetap		2.238.134.893.484	2.232.653.190.017
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.12	145.278.190.394	102.047.984.612
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.13	78.629.147.521	79.696.684.428
Aset Lain-lain	C.14	24.264.826.079	24.239.552.857
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(124.456.192.669)	(76.081.722.295)
Jumlah Aset Lainnya		123.715.971.325	129.902.499.602
JUMLAH ASET		2.390.207.300.749	2.372.360.607.746
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	77.075.313.679	81.012.548.924
Pendapatan Diterima di Muka	C.17	1.076.086.105	1.770.863.838
Uang Muka dari KPPN	C.18	104.475.690	678.341.646
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.19	1.382.184	3.281.807
JUMLAH KEWAJIBAN		78.257.257.658	83.465.036.215
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	2.311.950.043.091	2.288.895.571.531
JUMLAH EKUITAS		2.311.950.043.091	2.288.895.571.531
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.390.207.300.749	2.372.360.607.746

Jakarta, 09 MAY 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Rosan Perkasa Roeslani

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	798.282.016	675.091.049
JUMLAH PENDAPATAN		798.282.016	675.091.049
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	240.921.172.808	142.126.401.683
Beban Persediaan	D.3	4.402.439.685	5.083.250.300
Beban Barang dan Jasa	D.4	568.904.361.616	664.987.750.735
Beban Pemeliharaan	D.5	15.873.066.245	17.718.756.735
Beban Perjalanan Dinas	D.6	202.175.321.588	203.840.036.292
Beban Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.7	0	1.347.090
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	91.521.216.230	63.098.476.709
JUMLAH BEBAN		1.123.797.578.172	1.096.856.019.544
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.122.999.296.156)	(1.096.180.928.495)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.9		
PENDAPATAN		7.863.292.850	8.468.762.419
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	147.889.999
Pendapatan dari Kegiatan Non Ops Lainnya		7.863.292.850	8.320.872.420
BEBAN		4.509.881.176	19.662.460.906
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		3.841.653.213	19.662.459.303
Beban dari Kegiatan Non Ops Lainnya		668.227.963	1.603
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		3.353.411.674	(11.193.698.487)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.119.645.884.482)	(1.107.374.626.982)
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.119.645.884.482)	(1.107.374.626.982)

Jakarta, 09 MAY 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosan Perkasa Roeslani

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	2.288.895.571.531	2.311.419.950.932
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.119.645.884.482)	(1.107.374.626.982)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(736.047.089)	(296.770.438)
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	-	98.990.825
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.6	(316.903.265)	(433.022.763)
Koreksi Lain-lain	E.7	(419.143.824)	37.261.500
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	1.143.436.403.131	1.085.147.018.019
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		23.054.471.560	(22.524.379.401)
EKUITAS AKHIR	E.9	2.311.950.043.091	2.288.895.571.531

Jakarta, 09 MAY 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosan Perkasa Roeslani

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE TAHUN ANGGARAN 2024

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penanaman modal sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

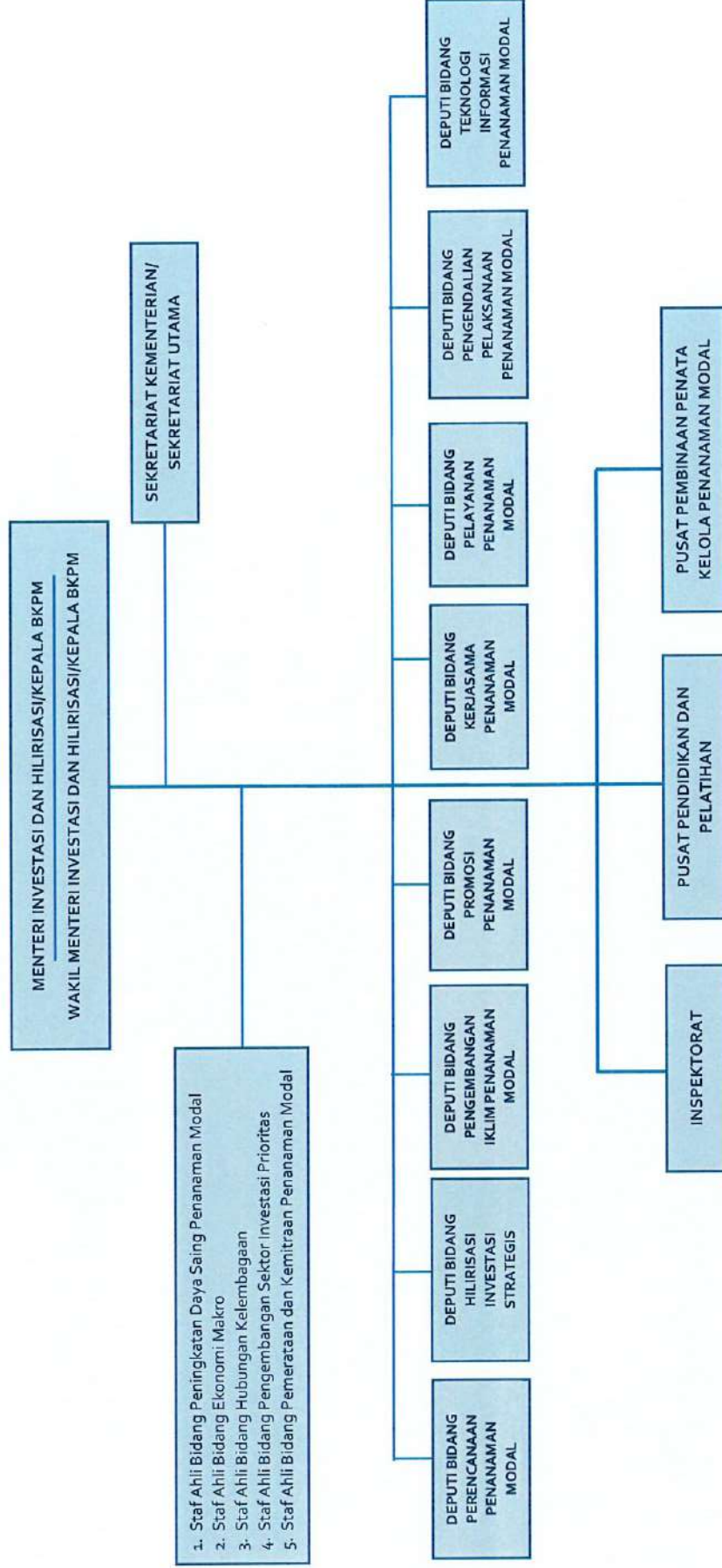
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal resmi ditetapkan sebagai Kementerian Negara dengan nama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 Tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berubah nomenklatur menjadi **Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal**.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Struktur organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan susunan kelembagaan sebagaimana dapat dilihat pada Bagan 1 sebagai berikut:

Bagan A.1.

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 dimaksud, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal terdiri atas:

- a. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM;
 - b. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM;
-
- Eselon I:
- c. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama;
 - d. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
 - e. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis;
 - f. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - g. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - h. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
 - i. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
 - j. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - k. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal;
-
- Staf Ahli:
- j. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal;
 - k. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;
 - l. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
 - m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas; dan
 - n. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal;
-
- Eselon II Mandiri:
- o. Inspektorat;
 - p. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - q. Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional maka Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menetapkan visi dan misi yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2024-2029 yaitu:

VISI

Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5 (lima) dari 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam "**Asta Cita**" sebagai berikut:

MISI

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan penanaman modal yang berkualitas melalui peningkatan penanaman modal di sektor prioritas termasuk hilirisasi, berorientasi ekspor, dan berbasis kewilayahan untuk memperkuat transformasi ekonomi; dan

2. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk memperkuat transformasi tata kelola penanaman modal.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu ***"Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri"*** sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang tinggi, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata;
2. Terwujudnya realisasi penanaman modal bidang hilirisasi untuk mendukung nilai tambah sumber daya alam; dan
3. Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima.

TARGET SASARAN STRATEGIS

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM T.A. 2024

Seluruh pelaksanaan kegiatan dan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kemudian dituangkan dalam target kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel A.1.
TARGET DAN REALISASI KINERJA
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya realisasi penanaman modal				
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal - (Rp Triliun)	1.239,30	1.714,20	138,32
2	Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder - (Rp Triliun)	646,1	721,30	111,64
3	Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di luar Jawa) - (%)	51,7	52,20	100,97
4	Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM - (%)	53,1	47,5	89,45
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal				
5	Peringkat Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) - (Peringkat EoDB)	40	27	120
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani				
6	Nilai reformasi birokrasi BKPM - (Predikat/Nilai)	80	71,91	89,89
7	Opini atas Laporan Keuangan BKPM - (Opini BPK)	WTP	WTP	100

Pada Tahun 2021, secara resmi diumumkan pemberhentian penerbitan laporan *Ease of Doing Business* (EoDB) dan adanya rencana penyusunan pendekatan baru yang dijadikan sebagai parameter penilaian iklim investasi bagi pelaku usaha. Sejak tahun 2022 peringkat kemudahan berusaha di Indonesia mengacu pada *World Competitiveness Yearbook 2023* yang diterbitkan Institute for Management Development (IMD). Dalam *World Competitiveness Yearbook 2023*, indeks daya saing kemudahan berusaha Indonesia mengalami peningkatan yang semula berada di peringkat ke-44 di Tahun 2022, menjadi peringkat ke-34 di Tahun 2023, serta menjadi peringkat 27 di Tahun 2024 dari total 64 negara di seluruh dunia.

Keterkaitan antara rencana strategis dengan program kerja dan realisasi penyerapan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel A.2.
REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

No	Program Kerja	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Program Penanaman Modal	1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal 2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal	721.629.726.000	668.345.108.689	92,62
2	Program Dukungan Manajemen	3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	507.666.216.000	479.396.756.976	94,43
JUMLAH			1.229.295.942.000	1.147.741.865.665	93,37

PENGELOLAAN APBN TAHUN 2024

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merupakan entitas akuntansi yang memiliki 47 (empat puluh tujuh) Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari 9 (sembilan) Satuan Kerja Pusat dan 38 (tiga puluh delapan) Satuan Kerja Dekonsentrasi dengan rincian sebagai berikut:

SATKER PUSAT		
No	Kode Satker	Nama Satker
1	017202	Sekretariat Utama/Sekretariat Kementerian
2	650102	Deputi Bidang Hilirisasi Informasi Strategis
3	650103	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
4	664848	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
5	664852	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
6	664869	Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal
7	664873	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
8	664880	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
9	670650	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
SATKER DEKONSENTRASI		
No	Kode Satker	Nama Satker
1	029002	DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
2	039002	DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
3	049001	DPMPTSP Provinsi DIY
4	050016	DPMPTSP Provinsi Jawa Timur
5	060038	DPMPTSP Nanggroe Aceh Darussalam
6	079001	DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara
7	080022	DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat
8	099001	DPMPTSP Provinsi Riau
9	100098	DPMPTSP Provinsi Jambi
10	119002	DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan
11	120020	DPMPTSP Provinsi Lampung
12	139001	DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat
13	140020	DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah
14	159002	DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
15	169001	DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
16	170029	DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara
17	180015	DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
18	190099	DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan
19	200028	DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara
20	210023	DPMPTSP Provinsi Maluku
21	220022	DPMPTSP Provinsi Bali
22	230024	DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat
23	249002	DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur
24	250024	DPMPTSP Provinsi Papua
25	260028	DPMPTSP Provinsi Bengkulu

No	Kode Satker	Nama Satker
26	280023	DPMPTSP Provinsi Maluku Utara
27	290018	DPMPTSP Provinsi Banten
28	300015	DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
29	310090	DPMPTSP Provinsi Gorontalo
30	320082	DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau
31	330082	DPMPTSP Provinsi Papua Barat
32	340096	DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat
33	417745	DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara
34	650101	DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
35	690916	DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya
36	690917	DPMPTSP Provinsi Papua Selatan
37	690918	DPMPTSP Provinsi Papua Tengah
38	690919	DPMPTSP Provinsi Papua Pegunungan

Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM T.A 2024 merupakan Laporan Keuangan yang dihasilkan dari konsolidasi Laporan Keuangan 9 (sembilan) Satker Pusat dan 38 (tiga puluh delapan) Satker Dekonsentrasi.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Penyusunan Laporan Keuangan pada SAKTI dilakukan menggunakan modul GL dan modul pelaporan. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Barang Milik Negara.

A.3. Basis Akuntansi

Basis
Akuntansi

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian

Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar
Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan
Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

Pendapatan -
LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

Pendapatan -
LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.3.
PENYISIHAN PIUTANG

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Penyisihan piutang tak tertagih pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tidak dilakukan untuk piutang belanja pegawai yang dapat dikompensasikan pembayarannya melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Nilai Persediaan disajikan sebesar Biaya Perolehan. Pada pertengahan tahun 2021 terdapat perubahan metode penilaian persediaan semula menggunakan metode Harga Pembelian Terakhir menjadi menggunakan metode *First in First out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar.

b. Aset Tetap

- Aset Tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol.
 Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai

dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada Pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

C. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.4.
MASA MANFAAT ASET TETAP

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan)	4 tahun

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak

Berwujud dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.5.
MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas**Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan
pagu
anggaran

Pagu Anggaran yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.229.295.942.000,00. Rincian pagu anggaran berdasarkan jenis belanja disajikan sebagai berikut:

Tabel B.1.

PAGU ANGGARAN PER JENIS BELANJA TA. 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	TA. 2024	
	Pagu Awal	Pagu Perubahan
Belanja Pegawai	163.719.525.000	251.203.078.000
Belanja Barang	928.210.233.000	867.300.733.000
Belanja Modal	137.366.184.000	110.792.131.000
Jumlah	1.229.295.942.000	1.229.295.942.000

Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan program kerja, rincian pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah sebagai berikut:

Tabel B.2.

PAGU ANGGARAN PER PROGRAM KERJA TA. 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian Program Kerja	Pagu Awal	Pagu Perubahan
Program Dukungan Manajemen	419.063.840.000	507.666.216.000
Program Penanaman Modal	810.232.102.000	721.629.726.000
Jumlah	1.229.295.942.000	1.229.295.942.000

Pada Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa revisi anggaran yang merubah jumlah anggaran pada level satuan kerja namun tidak merubah pagu anggaran total Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dengan rincian sebagai berikut:

- I. Perubahan anggaran akibat adanya perubahan target dan anggaran Prioritas Nasional serta pergeseran anggaran terkait belanja pegawai berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-216/AG/AG.3/2024 tanggal 14 Maret 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2024;
- II. Perubahan anggaran akibat realokasi dan optimalisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-291/AG/AG.3/2024 tanggal 19 April 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2024;
- III. Perubahan anggaran akibat realokasi anggaran Kementerian Investasi dan

Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-609/AG/AG.3/2024 tanggal 27 September 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2024; dan

- IV. Perubahan anggaran akibat realokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-749/AG/AG.3/2024 tanggal 5 November 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM TA 2024.

Rincian perubahan alokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel pada **Lampiran 1**.

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.442.627.534,00. Tidak terdapat estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Tahun Anggaran 2024.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel B.1.1.
ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	8.442.627.534	--
Jumlah	0	8.442.627.534	--

Realisasi Pendapatan pada pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.442.627.534,00 seluruhnya berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	67.392.000
2	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	388.132
3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	35.908.470
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	140.071.514
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8.198.864.424
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.994
Total		8.442.627.534

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp67.392.000,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa penerimaan pembayaran sewa ruang dari Notaris Mina Ng, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Persetujuan Sewa pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor S-97/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 17 Mei 2024.

2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp388.132,00 berasal dari pendapatan bunga rekening pemerintah yang terdiri dari:

- i. Pendapatan bunga atas Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada Satker Sekretariat Utama sebesar Rp19.107,00; dan
- ii. Pendapatan bunga atas Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Satker Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal sebesar Rp369.025,00 dengan rincian:
 - a) Pendapatan bunga rekening IIPC Seoul senilai Rp15.818,00;
 - b) Pendapatan bunga rekening IIPC Taipei senilai Rp167.900,00;
 - c) Pendapatan bunga rekening IIPC London senilai Rp184.577,00; dan
 - d) Pendapatan bunga rekening IIPC Tokyo senilai Rp730,00.

3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp35.908.470,00 berasal dari:

- a. Satker Sekretariat Utama berupa:
 - a) Pengenaan denda atas keterlambatan pekerjaan pengadaan *loose furniture* Ruang Kerja Lantai 7 dan 8 Gedung Ismail Saleh senilai Rp19.547.484,00;
 - b) Pengenaan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan Penyelesaian Kajian Dampak Survey Kemudahan Berusaha terhadap Arus *Foreign Direct Investment* (FDI) di Negara Berkembang senilai Rp171.172,00.
 - c) Pengenaan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan Penyusunan Kajian Penguatan Organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal senilai Rp929.494,00.
 - d) Pengenaan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan Penyusunan Kajian Kebijakan Dasar Penanaman Modal dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal senilai Rp3.352.906,00.

- b. Satker Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal berupa pengenaan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan pemutakhiran website Kementerian Investasi dan Hilirisasi senilai Rp11.907.414,00.

4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp140.071.514,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Tahun 2023 yang antara lain terdiri dari gaji dan tunjangan, honorarium tetap, dan uang makan yang baru disetorkan di Tahun 2024.

5. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp8.198.864.424 00 berasal dari pengembalian belanja barang TA 2023 yang baru disetorkan di Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Satker Sekretariat Utama sebesar Rp23.601.366,00 berupa:
 - a) Pengembalian honorarium tim bulan Oktober - Desember TA. 2023 sebesar Rp2.850.000,00;
 - b) Pengembalian sisa Dana Operasional Menteri (DOM) TA. 2023 sebesar Rp35.483,00;
 - c) Pengembalian kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp860.000,00; dan
 - d) Pengembalian kelebihan biaya langsung non personil pada PT Sinergi Visi Utama sebesar Rp19.855.883,00.
- b. Satker Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis sebesar Rp3.470.000,00 yang seluruhnya berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran Kegiatan Diseminasi Publik Peta Jalan (*Roadmap*) Hilirisasi Investasi Strategis TA 2023;
- c. Satker Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal sebesar Rp1.103.848.879,00 berupa:
 - a) Pengembalian kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas TA. 2023 sebesar Rp980.000,00;
 - b) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Kegiatan Analisis *Market Intelligence* Negara dan Sektor Prioritas Promosi TA. 2023 sebesar Rp2.349.835,00;

- c) Pengembalian kelebihan pembayaran barang berupa Pekerjaan Kegiatan Fasilitas Relokasi Perusahaan Asing ke Indonesia dan Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri TA. 2023 sebesar Rp1.059.950.000,00;
- d) Penihilan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas Kontrak Nomor 12/SP/PPK-DPPM/ALJAZEERA/VII/2023 untuk Kegiatan Penayangan Promosi Investasi di Media Elektronik Al-Jazeera sebesar Rp17.886.993,00; dan
- e) Penihilan RPATA atas Kontrak Nomor 13/SP/PPK-DPPM/ANALISIS-NTNP/VII/2023 untuk Kegiatan Analisis Negara Target dan Negara Pesaing sebesar Rp22.682.051,00.
- d. Satker Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp264.199.099,00 seluruhnya berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran atas Kegiatan Pemberian NIB kepada Pelaku Usaha UMK TA. 2023.
- e. Satker Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp402.102.131,00 berupa:
 - a) Pengembalian kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp205.168.110,00;
 - b) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM TA. 2023 sebesar Rp6.842.894,00;
 - c) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Eksekusi Realisasi Investasi Proyek Terkendala Wilayah Timur TA. 2023 sebesar Rp9.437.321,00;
 - d) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Satuan Tugas Percepatan Investasi TA. 2023 sebesar Rp8.837.029,00;
 - e) Pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Eksekusi Realisasi Investasi Proyek terkendala Wilayah Barat TA. 2023 sebesar Rp10.583.704,00; dan
 - f) Pengembalian kelebihan pembayaran dari PT. Destinasi Asia Indonesia atas kegiatan terkait Dana Alokasi Khusus sebesar Rp161.233.073,00.
- f. Satker Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal sebesar Rp3.219.304.715,00 dengan rincian:
 - a) Pengembalian kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp24.597.207,00;

- b) Pengembalian kelebihan belanja non personil Kegiatan Penyusunan Peta Peluang Investasi di Ibu Kota Nusantara TA. 2023 sebesar Rp550.067.876,00; dan
- c) Pengembalian kelebihan pembayaran belanja personil Peta Peluang Investasi TA. 2023 sebesar Rp2.644.639.632,00.
- g. Satker Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal sebesar Rp3.181.372.934,00 berupa:
 - a) Pengembalian kelebihan belanja atas kegiatan Pengadaan Platform Komputasi Awan Infrastruktur Pendukung OSS TA. 2023 sebesar Rp2.857.366.154,00; dan
 - b) Penihilan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas Kontrak Nomor 02/SP/PPK-DTIPM/CLOUD-OSS/IX/2023 untuk Pengadaan Penyediaan Platform Komputasi Awan Sebagai Infrastruktur Pendukung OSS TA 2023 sebesar Rp324.006.780,00.
- h. Satker Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp965.300,00 seluruhnya berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas.

6. Pendapatan Anggaran Lain-lain

Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp2.994,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa penerimaan atas kelebihan transfer Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Honorarium Tetap Bulan Desember 2023 a.n. Eka Sastra sesuai Nota Dinas Nomor 95/B.3/A.3/2024.

Rincian Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 bila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 12,13 persen.

Tabel B.1.2.

PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN TA 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% Naik/(Turun)
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	0	147.889.999	(100,00)
Pendapatan Sewa, Tanah, Gedung, dan Bangunan	67.392.000	1.229.665.000	(94,52)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	388.132	255.823	51,72
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	35.908.470	1.919.354	1.770,86
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	140.071.514	136.028.859	2,97
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	8.198.864.424	8.053.887.991	1,80
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	34.585.897	(100)
Pendapatan Lain-lain	2.994	4.277.513	(99,93)
Jumlah	8.442.627.534	9.608.510.436	(12,13)

Penurunan pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 sebagian besar berasal dari penurunan nilai Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL, dan Penerimaan Kembali belanja Modal TAYL.

B.2 Belanja

Belanja Rupiah Murni

Realisasi
Belanja
Negara

Realisasi Belanja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.147.741.378.665,00 atau mencapai 93,37 persen dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp1.229.295.942.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

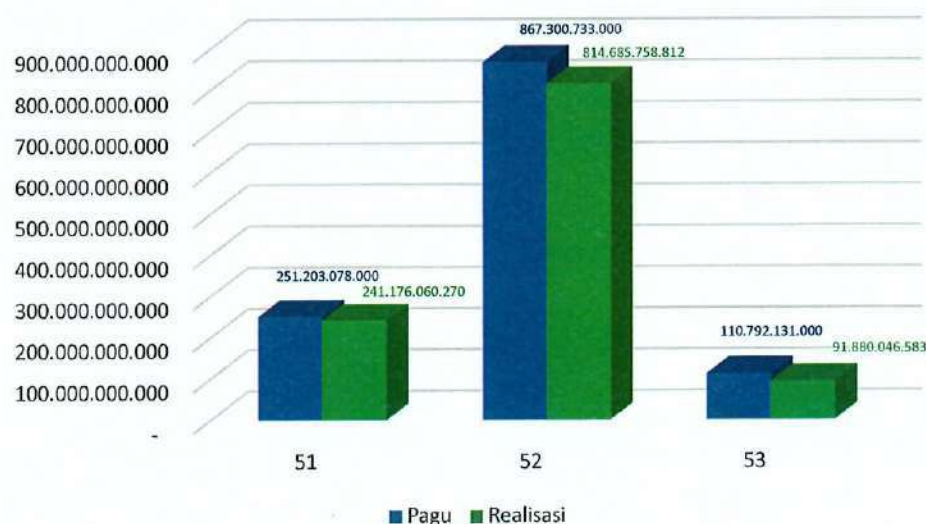
Tabel B.2.1.
PAGU DAN REALISASI PER JENIS BELANJA T.A. 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	251.203.078.000	241.176.060.270	96,01
Belanja Barang	867.300.733.000	814.685.758.812	93,93
Belanja Modal	110.792.131.000	91.880.046.583	82,93
Jumlah	1.229.295.942.000	1.147.741.865.665	93,37

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik B.2.1.
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PADA T.A. 2024
(dalam Rupiah)



B.3 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp241.176.060.270,00 dan Rp141.917.304.417,00. Realisasi belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar 69,94 persen dari realisasi belanja pegawai di periode yang sama pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel B.3.1.
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA PEGAWAI T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% Naik/(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	80.426.314.461	78.476.832.021	2,48
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	186.900.170	0	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.110.741.400	2.098.787.500	(47,08)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.080.172.770	0	0,00
Belanja Honorarium	7.579.961.747	6.337.872.110	19,60
Belanja Lembur	73.633.000	67.402.000	9,24
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	151.338.553.231	55.991.045.562	170,29
Jumlah Belanja Kotor	241.796.276.779	142.971.939.193	69,12
Pengembalian Belanja	620.216.509	1.054.634.776	(41,19)
Jumlah	241.176.060.270	141.917.304.417	69,94

Peningkatan realisasi belanja pegawai antara lain berasal dari peningkatan belanja untuk pembayaran Tunjangan Khusus yang baru dibayarkan pada TA. 2024, pembayaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat di TA. 2024, dan belanja honorarium untuk kelompok ahli Menteri Investasi/BKPM. Rincian Pengembalian Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel B.3.2.
RINCIAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI T.A. 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	80.426.314.461	565.815.479	79.860.498.982
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	186.900.170	0	186.900.170
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.110.741.400	0	1.110.741.400
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.080.172.770	0	1.080.172.770
Belanja Honorarium	7.579.961.747	24.920.442	7.555.041.305
Belanja Lembur	73.633.000	0	73.633.000
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	151.338.553.231	29.480.588	151.309.072.643
Jumlah	241.796.276.779	620.216.509	241.176.060.270

B.4 Belanja Barang

Belanja
Barang

Realisasi Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp814.685.758.812,00 dan Rp893.828.961.599,00. Realisasi Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 8,85 persen dari Realisasi Belanja Barang pada periode yang sama di Tahun Anggaran 2023. Penurunan belanja barang signifikan terjadi pada akun Belanja Perjalanan Luar Negeri dan Belanja Jasa.

Tabel B.4.1.

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA BARANG T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% Naik/(Turun)
Belanja Barang Operasional	45.642.387.074	44.173.588.075	3,33
Belanja Barang Non Operasional	55.860.771.011	61.458.072.833	(9,11)
Belanja Barang Persediaan	4.769.954.118	4.758.204.909	0,25
Belanja Jasa	490.881.255.437	562.401.856.586	(12,72)
Belanja Pemeliharaan	15.873.066.245	17.611.865.143	(9,87)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	134.414.605.085	121.942.909.567	10,23
Belanja Perjalanan Luar Negeri	67.855.088.759	82.142.216.482	(17,39)
Jumlah Belanja Kotor	815.297.127.729	894.488.713.595	(8,85)
Pengembalian Belanja	611.368.917	659.751.996	(7,33)
Jumlah	814.685.758.812	893.828.961.599	(8,85)

Rincian Pengembalian Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel B.4.2.

RINCIAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA BARANG T.A. 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto
Belanja Barang Operasional	45.642.387.074	37.784.569	45.604.602.505
Belanja Barang Non Operasional	55.860.771.011	33.293.750	55.827.477.261
Belanja Barang Persediaan	4.769.954.118	-	4.769.954.118
Belanja Jasa	490.881.255.437	445.918.342	490.435.337.095
Belanja Pemeliharaan	15.873.066.245	-	15.873.066.245
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	134.414.605.085	64.328.937	134.350.276.148
Belanja Perjalanan Luar Negeri	67.855.088.759	30.043.319	67.825.045.440
Jumlah	815.297.127.729	611.368.917	814.685.758.812

Belanja
Modal**B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp91.880.046.583,00 dan Rp59.205.388.245,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar 55,19 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Lainnya secara signifikan.

Tabel B.5.1.
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.612.284.125	23.574.902.084	72,27
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.019.241.676	7.891.440.961	1,62
Belanja Modal Lainnya	43.248.520.782	27.739.045.200	55,91
Jumlah Belanja Kotor	91.880.046.583	59.205.388.245	55,19
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	91.880.046.583	59.205.388.245	55,19

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp40.612.284.125,00 dan Rp23.574.902.084,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar 72,27 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel B.5.1.1.
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.612.284.125	23.574.902.084	72,27
Jumlah	40.612.284.125	23.574.902.084	72,27

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.019.241.676,00 dan Rp7.891.440.961,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,62 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel B.5.2.
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.019.241.676	7.891.440.961	1,62
Jumlah	8.019.241.676	7.891.440.961	1,62

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp43.248.520.782,00 dan Rp27.739.045.200,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar 55,91 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel B.5.3.
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL LAINNYA
T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Lainnya	43.248.520.782	27.739.045.200	55,91
Jumlah	43.248.520.782	27.739.045.200	55,91

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp104.475.690,00 dan Rp678.341.646,00.

Tabel C.1.1
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	104.475.690	678.341.646
Jumlah	104.475.690	678.341.646

Sisa Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 seluruhnya berbentuk uang tunai dan telah disetorkan ke kas negara pada awal bulan Januari 2025. Rincian penyetoran saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satuan Kerja disajikan sebagai berikut:

Tabel C.1.2
RINCIAN PENYETORAN SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

(Dalam Rupiah)

No	SATUAN KERJA	NTPN ^(*)	TANGGAL	JUMLAH
1	Deputi Kerjasama PM	57A56522CJVL8MIK	09-Jan-25	870.000
		CB8BA6QTC94E2MJM	09-Jan-25	2.035.690
2	Deputi Perencanaan PM	5E86B7NAS3PGAVCS	17-Jan-25	1.570.000
		2A59F6QTC98A2S57	21-Jan-25	100.000.000
Total				104.475.690

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp503.240.777,00 dan Rp598.593.012,00.

Kas Lainnya
dan Setara
Kas

Tabel C.2.1
KAS LAINNYA DAN SETARA KAS PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Kas Lainnya dan Setara Kas	503.240.777	598.593.012
Jumlah	503.240.777	598.593.012

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel C.2.2
DAFTAR RINCIAN KAS LAINNYA DAN SETARA KAS
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	SATUAN KERJA	31 DES 2024	31 DES 2023
1	Sekretariat Utama	501.845.511	595.108.048
2	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	13.082	203.157
3	DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	1.382.184	3.281.807
	Jumlah	503.240.777	598.593.012

Rincian penjelasan saldo Kas Lainnya dan Setara kas per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp501.845.511,00 pada Satker Sekretariat Utama merupakan saldo yang masih ada pada Rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 yang berasal dari pencairan honorarium tetap bulan Desember 2024 yang belum diserahkan kepada pegawai. Atas saldo ini seluruhnya telah diselesaikan di Bulan Januari 2025.
- Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp13.082,00 pada Satker Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal berasal dari Jasa Giro rekening milik Kantor IIPC Seoul yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.
- Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp1.382.184,00 pada Satker DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur berasal dari Utang Pajak Bendahara pengeluaran yang sudah disetorkan ke kas negara pada bulan November Tahun 2024 namun

terdapat kesalahan kode penyetoran akun pajak yang sampai dengan saat ini sedang dalam proses perbaikan.

Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM disajikan pada **Lampiran 2** Laporan Keuangan ini.

C.3 Belanja Dibayar Di muka (*Prepaid*)

Belanja
Dibayar
Dimuka

Saldo Belanja Dibayar Di muka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp26.479.577.654,00 dan Rp7.188.792.542,00.

Tabel C.3.1
BELANJA DIBAYAR DIMUKA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Belanja Dibayar Di muka (<i>Prepaid</i>)	26.479.577.654	7.188.792.542
Jumlah	26.479.577.654	7.188.792.542

Belanja Dibayar Di muka (*Prepaid*) merupakan pengeluaran Satuan Kerja/Pemerintah yang telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati Satuan Kerja/Pemerintah. Saldo Belanja Dibayar Di muka (*Prepaid*) Per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

Tabel C.3.2
RINCIAN BELANJA DIBAYAR DIMUKA MENURUT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	NILAI	
	31 DES 2024	31 DES 2023
Satker Sekretariat Utama	235.219.791	68.013.644
1. Perpanjangan IP Publik (2x254) dan domain (bkpm.go.id, oss.go.id, investindonesia.go.id)	-	3.906.690
2. Potongan Presensi Pegawai Bulan Desember	31.327.286	64.106.954
3. Lisensi Zoom	8.796.162	-
5. Lisensi Canva	1.865.110	-
6. Langganan (<i>membership</i>) Hukum Online	193.231.233	-
Satker Deputy Bidang Teknologi Informasi PM	19.959.575.063	7.120.778.898
1. Lisensi <i>Annual Technical Support</i> (ATS)	1.344.297.027	1.552.177.775
2. Lisensi <i>Business Intelligence</i>	1.509.622.813	968.771.467
3. Lisensi <i>Office 365</i>	460.494.506	419.209.972
4. Lisensi <i>Software Microservices</i>	2.210.747.253	2.346.587.059

URAIAN	NILAI	
	31 DES 2024	31 DES 2023
5. Lisensi <i>Application Monitoring System</i>	1.803.743.901	1.834.032.625
6. Lisensi <i>Threat Intelligence and Darkweb Monitoring Cyble</i>	10.849.305.560	-
7. Lisensi <i>Endpoint Security</i>	1.398.749.725	-
8. Lisensi <i>Vulnerability Assessment Tool</i>	172.211.538	-
9. Lisensi <i>Security Testing Tool</i>	210.402.740	-
Satker Deputi Bidang Promosi PM	6.273.075.833	-
1. Lisensi <i>Zoom</i>	13.098.343	-
2. Lisensi Aplikasi pada Kantor IIPC	21.684.976	-
3. Biaya Bantuan Pendidikan Anak (BBPA) pada IIPC Abu Dhabi	274.925.499	-
4. Biaya Sewa <i>venue World Economic Forum (WEF) - Davos</i>	5.963.367.015	-
Satker Deputi Bidang Pelayanan PM	11.706.967	-
1. Lisensi <i>Zoom</i>	11.706.967	-
Jumlah	26.479.577.654	7.188.792.542

Piutang
Bukan Pajak

C.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.090.354,00 dan Rp20.121.514,00.

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Tabel C.4.1
PIUTANG BUKAN PAJAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Piutang Bukan Pajak	7.090.354	20.121.514
Jumlah	7.090.354	20.121.514

Perbandingan rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31-12-2024	31-12-2023
1	Tri Hesti Saptari S. Sos.	-	630.000
2	Parihutan Martin Yosep S.E.	1.106.444	1.106.444
3	Sopyan	1.263.860	1.263.860
4	Usamah Widiatmoko	2.118.550	4.556.800
5	Andi Muhammad Faiz Adani Adnan, S.H.	-	2.603.000
6	Nurman Hidayat, S.T.	-	9.961.410

No	Uraian	31-12-2024	31-12-2023
7	Pungky Arifiandoko	1.301.500	-
8	Husen Maulana	1.300.000	-
Jumlah		7.090.354	20.121.514

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa kelebihan pembayaran belanja pegawai.

C.5 Persediaan

Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.262.051.465,00 dan Rp1.319.069.413,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tabel C.5.1
PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Persediaan	1.262.051.465	1.319.069.413
Jumlah	1.262.051.465	1.319.069.413

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 seluruhnya merupakan Barang Konsumsi dengan rincian mutasi pada Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	1.319.069.413
Mutasi tambah:	4.769.954.118
Pembelian	4.769.954.118
Mutasi kurang:	4.826.972.066
Pemakaian Persediaan Konsumsi	4.402.439.685
Pemakaian Persediaan Rusak/Usang	424.532.381
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	1.262.051.465

Mutasi Tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp4.769.954.118,00 berasal dari:

- Pembelian persediaan menggunakan akun 521811 (Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi) sebesar Rp4.296.571.419,00, merupakan pembelian persediaan berupa alat tulis kantor dan alat listrik lainnya; dan

- Pembelian persediaan menggunakan akun 521832 (Belanja Barang Persediaan Lainnya) sebesar Rp473.382.699,00, merupakan pembelian persediaan berupa obat-obatan.

Mutasi Kurang:

Mutasi kurang sebesar Rp4.826.972.066,00 berasal dari:

- Pemakaian Barang konsumsi berupa alat tulis kantor, alat listrik lainnya, dan Obat-obatan sebesar Rp4.402.439.685,00; dan
- Pencatatan persediaan usang sebesar Rp424.532.381,00 akibat perubahan nomenklatur Kementerian Investasi/BKPM menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sehingga atas persediaan yang antara lain berupa amplop, map, dan kop surat dengan nomenklatur lama menjadi tidak dapat digunakan lagi.

Persediaan senilai Rp1.262.051.465,00 pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian persediaan per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 3** Laporan Keuangan ini.

C.6 Tanah

Tanah

Tanah yang dimiliki Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama sebesar Rp1.959.546.919.000,00.

Tabel C.6.
TANAH PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Tanah	1.959.546.919.000	1.959.546.919.000
Jumlah	1.959.546.919.000	1.959.546.919.000

Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Luas Tanah	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	398 m ²	2.717.574.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	18.496 m ²	1.944.165.424.000
3	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	9.202 m ²	12.663.921.000
Total		28.096 m²	1.959.546.919.000

Terdapat koreksi luas tanah pada periode tahun 2024 dalam modul Aset Tetap Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk menyesuaikan antara luas tanah yang tercatat dalam aplikasi SAKTI dengan luas tanah sesuai sertifikat kepemilikan. Luas Tanah yang tercatat semula sebesar 28.348 m² dilakukan koreksi

kuantitas berkurang sebesar 252 m² sehingga luas tanah menjadi sebesar 28.096 m². Atas koreksi dimaksud tidak mengakibatkan perubahan nilai tanah dalam rupiah. Rincian koreksi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	NUP	Luas Tanah pada Sertipikat	Luas Tanah pada Aplikasi SAKTI	Selisih Nilai Koreksi
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1	236 m ²	242 m ²	(6 m ²)
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	2	162 m ²	162 m ²	-
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	18.496 m ²	18.742 m ²	(246 m ²)
4	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1	9.202 m ²	9.202 m ²	-
Total			28.096 m²	28.348 m²	(252 m²)

Dalam Laporan Barang Milik Negara per 31 Desember 2024 masih terdapat kesalahan pencatatan kodefikasi aset berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III seluas 398 m² yang seharusnya dicatat sebagai Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II. Atas kesalahan pencatatan ini akan dilakukan koreksi kodefikasi aset tanah pada periode tahun 2025 tanpa merubah luas dan nilai aset tanah.

Sertipikat Tanah dan bangunan sebagai bukti kepemilikan atas aset tanah seluruhnya dikuasai oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Terdapat Sertifikat Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan pada NUP 1 yang masih berstatus Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan saat ini sedang dalam proses perubahan ke Sertipikat Hak Pakai (SHP). Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus memantau proses pengalihan sertifikat ini.

Selanjutnya, sampai dengan posisi per 31 Desember 2024, terdapat sebagian aset tanah negara golongan II dan gedung bangunan rumah negara golongan II, yang berlokasi di Jalan Bima Raya Nomor 120 Depok sesuai Sertipikat Nomor 150, masih digunakan oleh pensiunan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM a.n. Bapak Said Ridwan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Luas	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	Tanah Negara Gol II	162 m ²	1.120.416.000	1.120.416.000
2	Bangunan Negara Gol II	50 m ²	99.824.000	59.270.000
Jumlah			1.220.240.000	1.179.686.000

Peralatan
dan Mesin**C.7 Peralatan dan Mesin**

Nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp380.253.431.212,00 dan Rp338.922.462.087,00.

Tabel C.7
PERALATAN DAN MESIN PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Peralatan dan Mesin	380.253.431.212	338.922.462.087
Jumlah	380.253.431.212	338.922.462.087

Terdapat mutasi nilai peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	338.922.462.087
Mutasi tambah:	45.526.990.145
1. Pembelian Barang Modal	40.612.284.125
2. Hibah Masuk	4.137.165.000
3. Penilaian Kembali (Revaluasi)	718.685.000
4. Reklasifikasi Masuk	58.856.020
Mutasi kurang:	4.196.021.020
1. Hibah Keluar	4.137.165.000
2. Reklasifikasi Keuar	58.856.020
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	380.253.431.212
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	310.059.459.543
Nilai Buku per 31 Desember 2024	70.193.971.669

Mutasi tambah:

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp45.526.990.145,00 terdiri dari:

1. Pembelian Peralatan dan Mesin menggunakan akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) sebesar Rp40.612.284.125,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Sekretariat Utama	22.065.026.125
Pengadaan Chiller dan AC	4.457.405.000
Pengadaan Peralatan Pengolah Data (Laptop, PC, Printer, Smartboard)	5.922.629.500

Uraian	Nilai
Pengadaan Furniture (Meja, Kursi, Sofa, Lemari)	7.445.334.380
Pengadaan Peralatan Kampus Investasi (TV, Water Heater, Mesin Cuci, Setrika)	927.217.950
Pengadaan Peralatan Kampus Investasi (CCTV, TV, Penghancur Kertas)	3.312.439.295
Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	18.547.258.000
Pengadaan Perangkat Keamanan Teknologi Informasi TA. 2024	5.880.000.000
Pengadaan Perangkat Jaringan Teknologi Informasi TA. 2024	1.580.000.000
Pengadaan Perangkat Jaringan TA. 2024	2.254.000.000
Pengadaan Revitalisasi Perangkat Data Center dan Command Center TA. 2024	5.067.258.000
Pengadaan Perangkat Keamanan Jaringan TA. 2024	3.766.000.000
Jumlah	40.612.284.125

2. Penerimaan Hibah Langsung Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.137.165.000,00 berupa 3 (tiga) unit Bus Listrik dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai menuju *Green Transportation* berdasarkan:
 - i) Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Nomor S-30/PR.8/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penerbitan Register Nomor 2M3BS2DA. Hibah langsung berupa Tiga (tiga) unit Bus Listrik dari *Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd* kepada Satker Sekretariat Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
 - ii) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor 01/SP3HLBJS/A.3/B.3/2024 tanggal 18 Januari 2024; dan
 - iii) Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor 814877515884328195 tanggal 23 Januari 2024.
3. Penambahan nilai sebesar Rp718.685.000,00 berasal dari hasil Penilaian Kembali Peralatan dan Mesin yang berlokasi di Kampus Investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-3376/KNL.0701/2024 tanggal 28 November 2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Penilaian BMN pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Berdasarkan surat dimaksud penilaian dilakukan atas 431 (empat ratus tiga puluh satu) unit Peralatan Mesin

dengan hasil penilaian sebesar Rp786.319.000,00 dengan rincian pencatatan sebagai berikut:

Jenis Aset	Jenis Laporan BMN	Jumlah	Nilai
Peralatan dan Mesin	Intrakomptable	282	718.685.000
Peralatan dan Mesin	Ekstrakomptable	110	22.394.000
Aset Tetap Lainnya	Intrakomptable	39	45.240.000
		431	786.319.000

Penilaian kembali peralatan dan mesin berupa barang intrakomptable sebesar Rp718.685.000,00 antara lain terdiri dari meja, sofa, tempat tidur, dan water heater.

4. Reklasifikasi masuk sebesar Rp58.856.020,00 berasal dari koreksi pencatatan akibat kesalahan penggunaan kodefikasi barang pada saat pencatatan pembelian. Atas kesalahan tersebut dilakukan koreksi dengan melakukan reklasifikasi keluar atas barang dengan kodefikasi yang salah, kemudian dicatat kembali melalui reklasifikasi masuk pada kodefikasi barang yang sudah sesuai. Rincian koreksi akibat kesalahan kodefikasi diatas adalah sebagai berikut:
 - i) Koreksi pencatatan Meja Kerja Besi dengan NUP 108 dan 109 menjadi Meja Kerja Kayu dengan NUP 1791 dan 1792 dengan nilai sebesar Rp15.220.320,00.
 - ii) Koreksi pencatatan Meja Kerja Besi dengan NUP 110 sampai dengan 115 menjadi Meja Kerja Kayu dengan NUP 1793 sampai dengan 1798 dengan nilai sebesar Rp40.259.700,00.
 - iii) Koreksi pencatatan Meja Kerja Kayu dengan NUP 1839 menjadi Lemari Kayu dengan NUP 339 dengan nilai sebesar Rp3.376.000,00.

Mutasi Kurang:

Mutasi kurang aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.196.021.020,00 berasal dari:

1. Hibah Keluar pada Satker Sekretariat Utama berupa 3 (tiga) Unit Bus Listrik yang diserahkan kepada Universitas Gajah Mada (UGM) berdasarkan:
 - i) Surat Menteri Keuangan Nomor S-87/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 24 April 2024 Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Investasi/BKPM;
 - ii) Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kepada Universitas Gajah Mada Nomor 001/BAST-BUS-UGM/KEMENINVES/2024 tanggal 30 Desember 2024; dan

- iii) Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 402 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupa 3 (tiga) unit Bus Listrik.

Atas Bus Listrik dengan nilai perolehan sebesar Rp4.137.165.000,00 telah dilakukan penyusutan sebesar Rp265.511.787.000,00 sehingga nilai buku aset menjadi sebesar Rp3.871.653.213,00.

2. Reklasifikasi keluar sebesar Rp58.856.020,00 berasal dari koreksi pencatatan akibat kesalahan penggunaan kodefikasi barang pada saat pencatatan pembelian. Atas kesalahan tersebut dilakukan koreksi dengan melakukan reklasifikasi keluar atas barang dengan kodefikasi yang salah, kemudian dicatat kembali melalui reklasifikasi masuk pada kodefikasi barang yang sudah sesuai. Rincian koreksi akibat kesalahan kodefikasi diatas adalah sebagai berikut:
- i) Koreksi pencatatan Meja Kerja Besi dengan NUP 108 dan 109 menjadi Meja Kerja Kayu dengan NUP 1791 dan 1792 dengan nilai sebesar Rp15.220.320,00.
 - ii) Koreksi pencatatan Meja Kerja Besi dengan NUP 110 sampai dengan 115 menjadi Meja Kerja Kayu dengan NUP 1793 sampai dengan 1798 dengan nilai sebesar Rp40.259.700,00.
 - iii) Koreksi pencatatan Meja Kerja Kayu dengan NUP 1839 menjadi Lemari Kayu dengan NUP 339 dengan nilai sebesar Rp3.376.000,00.

Selain mutasi aset sebagaimana dijelaskan diatas terdapat pula mutasi atas barang ekstrakomptable dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	33.104.099
Mutasi tambah:	51.464.000
1. Penilaian Kembali (Revaluasi)	22.394.000
2. Pembelian barang ekstrakomptable	29.070.000
Mutasi kurang:	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	84.568.099
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	57.660.949
Nilai Buku per 31 Desember 2024	26.907.150

Mutasi tambah sebesar Rp51.464.000,00 terdiri dari:

1. Hasil penilaian kembali atas barang ekstrakomptable sebesar Rp22.394.000,00 yang antara lain berupa meja kayu, kursi kayu, cermin, dan nakas.

Penilaian Kembali Peralatan dan Mesin dilaksanakan atas BMN yang berada di Kampus Investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-3376/KNL.0701/2024 tanggal 28 November 2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Penilaian BMN pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

2. Pembelian barang ekstrakomptable menggunakan akun 521252 (Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptable) sebesar Rp29.070.000,00 berupa pembelian partisi sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan NUP 254 sampai dengan 283.

Barang ekstrakomptable tidak tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2024 karena memiliki nilai satuan dibawah nilai kapitalisasi aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00, atas barang ekstrakomptable sebagaimana dimaksud dicatat secara terpisah dalam Laporan Barang Milik Negara Ekstrakomptable.

Pada tahun 2024 terdapat aset Peralatan dan Mesin milik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dititipkan kepada Pihak Lain berupa 4 (empat) unit Bus Listrik dengan NUP 2, 3, 4, dan 6 Merek Foxtron senilai Rp21.834.400.000,00. Bus dimaksud dititipkan pada pool bis milik PT. Energi Makmur Buana di Jl. Perintis Kemerdekaan DKI Jakarta.

Rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan Akumulasi penyusutannya disajikan pada **Lampiran 4** Laporan Keuangan ini.

C.8 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp294.993.064.951,00 dan Rp286.973.823.275,00.

Tabel C.8.1
GEDUNG DAN BANGUNAN PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Gedung dan Bangunan	294.993.064.951	286.973.823.275
Jumlah	294.993.064.951	286.973.823.275

Terdapat mutasi nilai gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	286.973.823.275
Mutasi tambah:	9.929.935.231
1. Pembelian/Renovasi	8.019.241.676
2. Koreksi pencatatan nilai bertambah	1.910.693.555
Mutasi Kurang:	1.910.693.555
Koreksi pencatatan nilai berkurang	1.910.693.555
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	294.993.064.951
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	91.641.971.952
Nilai Buku per 31 Desember 2024	203.351.092.999

Mutasi tambah:

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.929.935.231,00 seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan renovasi atas gedung dan bangunan menggunakan akun 533121 (Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan) sebesar Rp8.019.241.676,00 terdiri dari:
 - i) Renovasi pada Gedung Barli Halim Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp2.282.079.345,00 antara lain berasal dari pekerjaan renovasi ruang kerja Direktorat Sistem Layanan Informasi dan Jaringan (SLEIJ) dan Data Informasi, renovasi ruang kerja Auditor lantai 6, renovasi toilet lantai 6, dan renovasi ruang kerja pejabat penghubung lantai 6;
 - ii) Renovasi pada Gedung Ismail Saleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp4.567.666.974,00 antara lain berasal dari pekerjaan renovasi ruang kerja Kedeputan Bidang Hilirisasi Investasi Strategis lantai 4, renovasi ruang kerja Inspektorat lantai 5, renovasi ruang kerja Direktorat Wilayah I lantai 6, renovasi ruang kerja Deputi Teknologi Informasi lantai 3, dan renovasi toilet lantai 4 dan 6;
 - iii) Renovasi pada Gedung Suhartoyo Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp974.594.563,00 antara lain berasal dari renovasi ruang sementara Deputi Teknologi Informasi dan renovasi toilet lantai 3 dan 8; dan

- iv) Renovasi Gedung Parkir Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp194.900.794,00 berasal dari renovasi toilet rooftop gedung parkir.
- 2. Koreksi pencatatan nilai bertambah sebesar Rp1.910.693.555,00 merupakan koreksi pencatatan akibat kesalahan penginputan rincian aset dalam Aplikasi SAKTI. Koreksi dilaksanakan dengan melakukan koreksi nilai berkurang atas rincian aset yang salah diinput kemudian dicatat kembali menggunakan koreksi nilai bertambah pada kode/rincian yang sesuai. Rincian koreksi adalah sebagai berikut:
 - i) Koreksi atas asrama permanen yang semula dicatat dalam 1 NUP dengan dikoreksi menjadi 21 NUP dengan nilai koreksi sebesar Rp1.715.792.761,00. Koreksi ini merupakan tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan BPK R.I tahun 2023.
 - ii) Koreksi atas pencatatan renovasi toilet rooftop gedung parkir yang semula dicatat pada gedung bangunan kantor menjadi dicatat sebagai gedung parkir senilai Rp194.900.794,00.

Mutasi Kurang sebesar Rp1.910.693.555,00 merupakan koreksi koreksi pencatatan akibat kesalahan penginputan rincian aset dalam Aplikasi SAKTI. Koreksi dilaksanakan dengan melakukan koreksi nilai berkurang atas rincian aset yang salah diinput kemudian dicatat kembali menggunakan koreksi nilai bertambah pada kode/rincian yang sesuai. Rincian koreksi adalah sebagai berikut:

- i) Koreksi atas asrama permanen yang semula dicatat dalam 1 NUP dengan dikoreksi menjadi 21 NUP dengan nilai koreksi sebesar Rp1.715.792.761,00. Koreksi ini merupakan tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan BPK R.I tahun 2023.
- ii) Koreksi atas pencatatan renovasi toilet rooftop gedung parkir yang semula dicatat pada gedung bangunan kantor menjadi dicatat sebagai gedung parkir senilai Rp194.900.794,00.

Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada **Lampiran 4** Laporan Keuangan ini.

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi,
dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama masing-masing sebesar Rp9.022.115.183,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama periode Tahun Anggaran 2024.

Tabel C.9.1
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.022.115.183	9.022.115.183
Jumlah	9.022.115.183	9.022.115.183

Rincian nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	QTY	Nilai
1	Jalan	6.211m ²	1.908.177.000
2	Irigasi	12 Unit	2.250.774.000
3	Jaringan	7 Unit	4.863.164.183
Total			9.022.115.183

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada **Lampiran 4** Laporan Keuangan ini.

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.510.762.849,00 dan Rp1.447.207.849,00.

Tabel C.10.1
ASET TETAP LAINNYA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Aset Tetap Lainnya	1.510.762.849	1.447.207.849
Jumlah	1.510.762.849	1.447.207.849

Terdapat mutasi Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	1.447.207.849
Mutasi tambah:	63.555.000
1. Pembelian	18.315.000

Uraian	Jumlah
2. Penilaian kembali	45.240.000
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	1.510.762.849
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	641.264.175
Nilai Buku per 31 Desember 2024	869.498.674

Mutasi tambah sebesar Rp63.555.000,00, seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama yang terdiri dari:

1. Pembelian Lukisan senilai Rp18.315.000,000; dan
2. Penambahan nilai sebesar Rp45.240.000,00 berasal dari hasil Penilaian Kembali Peralatan dan Mesin yang berlokasi di Kampus Investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-3376/KNL.0701/2024 tanggal 28 November 2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Penilaian BMN pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Berdasarkan surat dimaksud penilaian dilakukan atas 431 (empat ratus tiga puluh satu) unit Peralatan Mesin dengan hasil penilaian sebesar Rp786.319.000,00 dengan rincian pencatatan sebagai berikut:

Jenis		Jumlah	Nilai
Peralatan dan Mesin	Intrakomptable	282	718.685.000
Peralatan dan Mesin	Ekstrakomptable	110	22.394.000
Aset Tetap Lainnya		39	45.240.000
Total		431	786,319,000.00

Hasil penilaian kembali atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp45.240.000,00 seluruhnya berupa Lukisan.

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada **Lampiran 4** Laporan Keuangan ini.

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(407.191.399.711,00) dan Rp(363.259.337.377,00).

Tabel C.11.
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(407.191.399.711)	(363.259.337.377)
Jumlah	(407.191.399.711)	(363.259.337.377)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.959.546.919.000	-	1.959.546.919.000
Peralatan dan Mesin	380.253.431.212	(310.059.459.543)	70.193.971.669
Gedung dan Bangunan	294.993.064.951	(91.641.971.952)	203.351.092.999
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.022.115.183	(4.848.704.041)	4.173.411.142
Aset Tetap Lainnya	1.510.762.849	(641.264.175)	869.498.674
Jumlah	2.645.326.293.195	(407.191.399.711)	2.238.134.893.484

Selanjutnya Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Beban Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Saldo
Peralatan dan Mesin	280.952.004.790	28.684.281.540	423.173.213	310.059.459.543
Gedung dan Bangunan	77.114.874.851	14.210.193.836	316.903.265	91.641.971.952
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.648.309.186	200.394.855	-	4.848.704.041
Aset Tetap Lainnya	544.148.550	51.875.625	45.240.000	641.264.175
Jumlah	363.259.337.377	43.146.745.856	785.316.478	407.191.399.711

Terdapat koreksi nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp785.316.478,00 yang seluruhnya berasal dari Satker Sekretariat Utama yang disebabkan oleh:

1. Koreksi nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp423.173.213,00 berasal dari koreksi pencatatan nilai bertambah atas hasil

- penilaian kembali sebesar Rp718.685.000,00 dan koreksi pencatatan nilai berkurang atas hibah peralatan dan mesin berupa 3 (tiga) unit bus listrik sebesar Rp(295.511.787,00);
2. Koreksi nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp316.903.265,00 berasal dari:
 - a. Pencatatan koreksi atas pekerjaan Renovasi Toilet Rooftop Gedung Parkir Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang semula dicatat pada Gedung Kantor Permanen NUP 1 dikoreksi menjadi Bangunan Parkir Tertutup Permanen NUP 1; dan
 - b. Pencatatan koreksi atas pemisahan NUP untuk Aset berupa Asrama Permanen pada Kampus Investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang semula dicatat dalam 1 NUP dikoreksi menjadi 20 NUP.
 3. Koreksi nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp45.240.000,00 seluruhnya berasal dari koreksi pencatatan nilai bertambah atas hasil penilaian kembali.

C.12 Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Per Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp145.278.190.394,00 dan Rp102.047.984.612,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel C.12.
ASET TAK BERWUJUD PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Aset Tak Berwujud	145.278.190.394	102.047.984.612
Jumlah	145.278.190.394	102.047.984.612

Terdapat mutasi Aset Tak Berwujud pada Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	102.047.984.612
Mutasi tambah:	43.230.205.782

Uraian	Jumlah
Pembelian	43.230.205.782
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	145.278.190.394
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	106.685.130.305
Nilai Buku per 31 Desember 2024	38.593.060.089

Mutasi tambah sebesar Rp43.230.205.782,00 seluruhnya berasal dari pembelian dan pengembangan Aset Tak Berwujud pada Satker Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Portal Satu Data sebesar Rp806.690.550,00;
2. Pengadaan Sistem Analisis Data Tindak Lanjut (*Advanced Analytics*) sebesar Rp2.832.846.650,00;
3. Pengembangan Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) sebesar Rp35.872.490.582,00;
4. Pengembangan Sistem Kepegawaian Terintegrasi dengan Aplikasi Perkantoran (*e-Office*) sebesar Rp2.812.140.500,00; dan
5. Pengembangan Aplikasi Potensi Investasi Regional (PIR) sebesar Rp906.037.500,00

Daftar rincian Aset Tak Berwujud disajikan dalam **Lampiran 5** Laporan Keuangan ini.

C.13 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp78.629.147.521,00 dan Rp79.696.684.428,00.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (DYDP) merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Tabel C.13.
DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	78.629.147.521	79.696.684.428
Jumlah	78.629.147.521	79.696.684.428

Adapun Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Tahun 2024 merupakan dana pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) atas Kontrak pekerjaan dengan tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 21 s.d 31 Desember 2024 yang sudah membebani anggaran namun belum dibayarkan kepada penyedia yang berhak.

C.14 Aset Lain - Lain

Aset Lain
Lain

Saldo Aset Lain-lain Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama masing-masing sebesar Rp24.264.826.079,00 dan Rp24.239.552.857,00.

Tabel C.14.1
ASET LAIN-LAIN PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Aset Lain-lain	24.264.826.079	24.239.552.857
Jumlah	24.264.826.079	24.239.552.857

Terdapat mutasi nilai Aset Lain-Lain pada Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	24.239.552.857
Mutasi tambah:	664.182.486
Penambahan Deposit Sewa Kantor IIPC	664.182.486
Mutasi Kurang:	638.909.264
1. Koreksi pencatatan nilai kurs per 31 Desember 2023	418.218.824
2. Beban Selisih Kurs per 31 Desember 2024	220.690.440
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	24.264.826.079
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	17.771.062.364
Nilai Buku per 31 Desember 2024	6.493.763.715

Mutasi tambah sebesar Rp664.182.486,00 seluruhnya berasal dari transaksi penambahan Deposit sewa ruang kantor *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC) tahun 2024 (menggunakan kurs pada saat transaksi) dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan deposit sewa ruang kantor IIPC Singapore sebesar Rp49.394.668,00
2. Penambahan deposit sewa ruang kantor IIPC Sydney sebesar Rp614.787.818,00.

Mutasi Kurang sebesar Rp638.909.264,00 berasal dari:

1. Koreksi pencatatan sebesar Rp418.218.824,00 merupakan koreksi atas saldo deposit sewa ruang kantor per 31 Desember 2023 yang semula dicatat menggunakan kurs transaksi dengan nilai Rp6.468.490.493,00 dikoreksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp6.050.271.669,00. Atas deposit yang menggunakan mata uang tertentu yang tidak terdapat dalam kurs tengah BI dilakukan koreksi dengan cara melakukan konversi ke dalam mata uang USD terlebih dahulu.
2. Pencatatan beban selisih kurs sebesar Rp220.690.440,00 merupakan penyesuaian nilai deposit sewa kantor IIPC berdasarkan kurs tengah BI per 31 Desember 2024.

Rincian Aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.264.826.079,00 terdiri dari:

URAIAN	31 DES 2024
1. Deposit Sewa Ruang Kantor IIPC	6.493.763.715
2. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	17.098.177.364
3. Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional	672.885.000
Jumlah	24.264.826.079

1. Deposit sewa ruang kantor pada kantor perwakilan BKPM di Luar Negeri, *Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)*, yang masih berada pada pemilik Gedung sebesar Rp6.493.763.715,00. Deposit sewa akan dikembalikan ke Kas Negara pada saat perjanjian sewa berakhir dan/tidak diperpanjang akibat kantor perwakilan mengalami perpindahan atau penutupan. Rincian deposit sewa ruang kantor disajikan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel C.14.2

DEPOSIT SEWA KANTOR IIPC PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Pemilik Gedung (Lessor)	IIPC (Lessee)	Nilai Deposit	Kurs Per 31-12-2024	Jumlah
1	Fukoku Mutual Seimei Insurance Company	Tokyo, Jepang	JPY 15.460.170,00	102,36	1.582.540.879
2	Suntec Real Estate Investment Trust	Singapura	SGD 51.624,00	11.919,34	512.770.007
3	Servcorp Administration Services Ltd	Abu Dhabi, UEA	AED 94.840,00	4,389	417.373.473
4	Sherwood 370 Lexington LLC (d/h)	New York, USA	USD 26.693,23	16,162	431.415.983
5	Landmark Space Limited	London, Inggris	GBP 28.400,00	20.332,61	577.446.124
6	Dexus Property Group	Sydney, Australia	AUD 198.705,00	10.081,88	2.003.330.047
7	SIFC Tower One Development YH	Seoul, Korea Selatan	KRW 88.281.294,00	10,98	968.887.202
				Total	6.493.763.715

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp17.098.177.364,00 berasal dari pencatatan atas aset yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional kantor, baik karena kondisi rusak berat maupun non rusak berat berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Tim Pemeriksa BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Tabel C.14.3

RINCIAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH

(Dalam Rupiah)

No	Satuan Kerja	Jenis Aset	Jumlah
1	Sekretariat Utama	PM	16.957.466.864
2	Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal	PM	84.300.000
3	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	PM	41.800.000
4	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	PM	14.610.500
		Total	17.098.177.364

Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan disajikan dalam **Lampiran 6** Laporan Keuangan ini. Rincian barang sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- i) Barang dengan Kondisi Rusak Berat senilai Rp10.630.295.294,00 antara lain berupa Sepeda Motor, Televisi, Peralatan Jaringan Lainnya, dan Notebook.

Atas barang dengan kondisi rusak berat ini akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan pada periode tahun 2025.

- ii) Barang dengan Kondisi Non Rusak Berat senilai Rp6.467.882.070,00 antara lain berupa 9 (sembilan) unit sedan dan 16 (enam belas) unit minibus. Atas barang dengan kondisi non rusak berat telah dilakukan cek fisik ulang dan berdasarkan hasil cek fisik tersebut akan dilakukan penggunaan kembali BMN di tahun 2025 sebanyak 9 (sembilan) unit sedan dan 14 (empat belas) unit Minibus. Sementara atas 2 (dua) unit Minibus yang kondisinya rusak akan diusulkan untuk dihapuskan.
3. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp672.885.000,00 berasal dari pencatatan penghentian aset atas *Software* berupa Sistem *Helpdesk* Layanan Berusaha (NUP 12) sebesar Rp290.400.000,00 dan Sistem Penyampaian Data Elektronik (NUP 13) sebesar Rp382.485.000,00 yang sudah tidak digunakan lagi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Tim Pemeriksa BPK R.I. pada Satker Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal. Atas Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud di atas sedang dalam proses penghapusan.

C.15 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi
Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(124.456.192.669,00) dan Rp(76.081.722.295,00).

Tabel C.15.1
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(124.456.192.669)	(76.081.722.295)
Jumlah	(124.456.192.669)	(76.081.722.295)

Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Beban Penyusutan/ Amortisasi	Saldo
Akm. Peny. Aset Tetap yang tidak digunakan	17.098.177.364	-	17.098.177.364
Akumulasi Amortisasi Software	58.166.831.091	48.240.528.516	106.407.359.607
Akumulasi Amortisasi Lisensi	143.828.840	133.941.858	277.770.698
Akm. Peny. Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	672.885.000	-	672.885.000
Total	76.081.722.295	48.374.470.374	124.456.192.669

C.16 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang
Kepada
Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp77.075.313.679,00 dan Rp81.012.548.924,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Tabel C.16.1

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Utang Kepada Pihak Ketiga	77.075.313.679	81.012.548.924
Jumlah	77.075.313.679	81.012.548.924

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga disajikan dalam daftar berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DES 2024	31 DES 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	68.112.066	366.969.289
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	801.611.987	814.722.587
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	76.205.589.626	79.830.857.048
Total	77.075.313.679	81.012.548.924

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp68.112.066,00 seluruhnya merupakan kekurangan pembayaran Belanja Pegawai tahun 2024 yang baru diajukan pembayarannya pada bulan Januari tahun 2025.
2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp801.611.987,00 terdiri dari:

- Tagihan Listrik dari PT PLN Persero atas Gedung Diklat, Gedung Kantor, Gedung Parkir, dan Gedung Auditorium Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk periode Desember 2024 dengan nomor Tagihan AGA/PUSAT/2025/017202 sebesar Rp786.252.728,00 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2025.
 - Tagihan Telepon dari PT Telkom atas pemakaian telepon di Gedung Kantor dan *Daycare* Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk periode Desember 2024 dengan nomor Tagihan masing-masing 0420250105000172020001 sebesar Rp14.480.031,00, 50111209664 dan 50111210134 sebesar Rp416.700,00 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2025.
 - Tagihan *Handphone* dari PT Indosat atas pemakaian jaringan telekomunikasi Unit Protokol Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk periode Desember 2024 dengan nomor Tagihan 0250884781 sebesar Rp325.028,00 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2025.
 - Tagihan Air dari PT PAM atas Gedung Diklat untuk periode Desember 2024 dengan nomor Tagihan 12180A-13/2025/800266 sebesar Rp137.500,00 yang baru dibayarkan bulan pada Januari 2025.
3. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp76.205.589.626,00 terdiri dari:
- Honorarium Tetap Bulan Desember 2024 sebesar Rp461.577.104,00 yang belum diserahkan kepada pegawai yang berhak sampai dengan tanggal pelaporan dan baru diserahkan pada bulan Januari 2025.
 - Tagihan Kontrak pekerjaan dengan tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 21 s.d 31 Desember 2024 yang dananya tersimpan dalam RPATA namun belum dibayarkan kepada penyedia yang berhak sampai dengan tanggal pelaporan sebesar Rp75.744.012.522,00.

C.17 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima di
Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.076.085.105,00 dan Rp1.770.863.838,00. Pendapatan Diterima Di muka merupakan pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Tabel C.17.
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023
Pendapatan Diterima Di muka	1.076.086.105	1.770.863.838
Jumlah	1.076.086.105	1.770.863.838

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 seluruhnya berasal dari Pendapatan Sewa pada Satker Sekretariat Utama berupa Pendapatan Sewa Ruang Kantor/Lahan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah		Penjelasan
	31-12-2024	31-12-2023	
PT. BRI (Persero), Tbk.	142.484.678	229.093.011	Sewa Ruang Kantor
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	372.947.777	596.716.444	Sewa Ruang Kantor
PT. Telkom	322.254.000	483.381.000	Sewa Lahan
Koperasi Karyawan "Pecanderaan"	171.657.050	271.168.383	Sewa Ruang Kantor
PT. Bank Negara Indonesia, Tbk	38.101.000	190.505.000	Sewa Ruang Kantor
Kantor Notaris Mina Ng	28.641.600	-	Sewa Ruang Kantor
Total	1.076.086.105	1.770.863.838	

C.18 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp104.475.690,00 dan Rp678.341.646,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.19 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang
Jangka
Pendek
Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.382.184,00 dan Rp3.281.807,00. Utang Jangka Pendek Lainnya pada tanggal pelaporan seluruhnya berasal dari utang pajak yang belum disetor ke Kas negara oleh Bendahara Pengeluaran pada Satker DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. Atas Utang Pajak dimaksud telah disetorkan ke Kas Negara pada bulan November 2024 namun terdapat kesalahan kode penyetoran akun pajak yang sampai dengan saat ini sedang dalam proses perbaikan.

C.20 Ekuitas

Ekuitas Ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.311.950.043.091,00 dan Rp2.288.895.571.531,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan
PNBP

Jumlah Pendapatan pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp798.282.016,00 dan Rp675.091.049,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.1.
PERBANDINGAN RINCIAN PENDAPATAN T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/ (turun)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	762.169.733	659.446.865	15,58
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	200.819	433.932	(53,72)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	35.908.470	10.584.134	239,27
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	2.994	4.626.118	(99,94)
Jumlah	798.282.016	675.091.049	18,25

Bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 terjadi peningkatan nilai pendapatan pada Tahun 2024 sebesar 18,25 persen yang berasal dari peningkatan penerimaan pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan, dan penerimaan dari pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut.

- A. Pengakuan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp762.169.733,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp86.608.333,00;
 - 2) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebesar Rp223.768.667,00;
 - 3) PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp161.127.000,00;
 - 4) Koperasi "Pecanderaan" sebesar Rp99.511.333,00;
 - 5) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp152.404.000,00; dan
 - 6) Kantor Notaris Mina NG sebesar Rp38.750.400,00.
- B. Pengakuan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Tahun 2024 sebesar Rp200.819,00 berasal dari Satker Sekretariat Utama sebesar Rp19.107,00 atas Bunga Rekening Giro RPL bulan Mei s.d Juli 2024 dan Satker Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal sebesar Rp181.712,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bunga Rekening Bank IIPC Seoul sebesar Rp13.082,00;

- 2) Bunga Rekening Bank IIPC Tokyo sebesar Rp730,00; dan
 - 3) Bunga Rekening Bank IIPC Taipei sebesar Rp167.900,00;
- C. Pengakuan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah T.A. 2024 sebesar Rp35.908.470,00 yang berasal dari:
- 1) Satker Sekretariat Utama sebesar Rp24.001.056,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Loose Furniture Ruang Kerja Lantai 7 sebesar Rp6.905.632,00;
 - ii. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Loose Furniture Ruang Kerja Lantai 8 sebesar Rp11.492.000,00;
 - iii. Kekurangan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Loose Furniture Ruang Kerja Lantai 7 sebesar Rp431.602,00;
 - iv. Kekurangan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Loose Furniture Ruang Kerja Lantai 8 sebesar Rp718.250,00;
 - v. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Kajian Dampak Survei Kemudahan Berusaha terhadap Arus *Foreign Direct Investment* (FDI) di Negera Berkembang sebesar Rp171.172,00;
 - vi. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyusunan Kajian Penguatan Organisasi Kementerian Investasi/BKPM Dalam Rangka Penyusunan RUU Tentang Perubahan UU 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebesar Rp929.494,00; dan
 - vii. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyusunan Kajian Kebijakan Dasar Penanaman Modal Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebesar Rp3.352.906,00.
 - 2) Satker Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal sebesar Rp11.907.414,00 berupa Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemeliharaan dan Pemutakhiran Website Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- D. Pengakuan Pendapatan Anggaran Lain-lain T.A. 2024 sebesar Rp2.994,00 berasal dari Satker Sekretariat Utama berupa kelebihan pengembalian belanja pegawai a.n. Eka Sastra.

Terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Pend-LRA	Pend-LO	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	67.392.000	762.169.733	(694.777.733)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	388.132	200.819	187.313
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	35.908.470	35.908.470	-
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	2.994	2.994	-
Jumlah	103.691.596	798.282.016	(694.590.420)

Perbedaan nilai sebesar Rp(694.590.420,00) disebabkan karena perbedaan metode pencatatan dimana Pendapatan-LRA menggunakan *Cash Basis* sementara Pendapatan LO menggunakan *Akrual Basis*. Penjelasan atas selisih per jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Selisih nilai pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan sebesar Rp(694.777.733,00) berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan yang secara riil diakui sebagai pendapatan di Tahun 2024;
2. Selisih nilai pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp187.313,00 berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) yang secara riil diakui sebagai pendapatan di Tahun 2024;

D.2 Beban Pegawai

Beban
Pegawai

Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp240.921.172.808,00 dan Rp142.126.401.683,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.2.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN PEGAWAI T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/(turun)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	79.668.008.476	77.664.020.598	2,58
Beban Tunjangan Lain-lain Pejabat Negara	186.900.170	-	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.110.741.400	2.098.787.500	(47,08)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	1.080.172.770	-	100,00
Beban Honorarium	7.571.357.344	6.241.512.506	21,31
Beban Lembur	73.633.000	66.548.900	10,64
Beban Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	150.211.067.783	56.055.532.179	167,97
Beban Tunjangan Khusus PPPK	1.019.291.865	-	100,00
Jumlah	240.921.172.808	142.126.401.683	69,51

Terdapat perbedaan nilai antara Belanja-LRA dengan Beban-LO per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	79.860.498.982	79.668.008.476	192.490.506
Beban Tunjangan Lain-lain Pejabat Negara	186.900.170	186.900.170	0
Beban Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.110.741.400	1.110.741.400	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	1.080.172.770	1.080.172.770	0
Beban Honorarium	7.555.041.305	7.571.374.344	0
Beban Lembur	73.633.000	73.633.000	0
Beban Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	150.289.780.778	150.211.067.783	78.712.995
Beban Tunjangan Khusus PPPK	1.019.291.865	1.019.291.865	0
Jumlah	241.176.060.270	240.921.172.808	271.203.501

Perbedaan nilai sebesar Rp271.203.501,00 disebabkan karena perbedaan metode pencatatan dimana Belanja-LRA menggunakan *Cash Basis* sementara Beban-LO menggunakan *Akrual Basis*. Penjelasan atas selisih per jenis beban adalah sebagai berikut:

1. Selisih nilai Beban Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp192.490.506,00 berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas Beban Gaji dan Tunjangan PNS yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024; dan
2. Selisih nilai Beban Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito sebesar Rp78.712.995,00 berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas Beban Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024.

D.3 Beban Persediaan

Beban
Persediaan

Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.402.439.685,00 dan Rp5.083.250.300,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.3.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/(turun)
Beban Persediaan Konsumsi	4.402.439.685	5.083.250.300	(13,39)
Jumlah	4.402.439.685	5.083.250.300	(13,39)

Terdapat perbedaan nilai antara Belanja-LRA dengan Beban-LO per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih
Beban Persediaan Konsumsi	4.769.954.118	4.402.439.685	367.514.433
Jumlah	4.769.954.118	4.402.439.685	367.514.433

Perbedaan nilai sebesar Rp367.514.433,00 disebabkan karena perbedaan metode pencatatan dimana Belanja-LRA menggunakan *Cash Basis* sementara Beban-LO menggunakan *Akrual Basis*. Pada LRA Belanja Persediaan dihitung berdasarkan jumlah persediaan yang dibeli di Tahun Anggaran 2024, sementara Beban Persediaan pada LO dihitung berdasarkan jumlah persediaan yang terpakai di Tahun Anggaran 2024.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban
Barang dan
Jasa

Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp568.904.240.361.616,00 dan Rp664.987.750.735,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.4.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN BARANG DAN JASA T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/(turun)
Beban Barang Operasional	45.358.126.404	43.096.620.499	5,25
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	-	899.177.219	(100,00)
Beban Barang Non Operasional	55.552.551.762	61.430.640.333	(9,57)
Beban Langganan Daya dan Jasa	10.555.013.020	11.084.626.755	(4,78)
Beban Jasa Konsultan	136.887.870.292	134.879.575.765	1,49
Beban Sewa	90.398.504.200	92.381.515.326	(2,15)
Beban Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	9.491.175.718	-	100,00
Beban Jasa Profesi	8.449.086.059	10.542.876.501	(19,86)
Beban Jasa Lainnya	212.212.034.161	310.471.340.337	(31,65)
Beban Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19	-	201.738.000	(100)
Jumlah	568.904.361.616	664.987.750.735	(14,45)

Bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 terjadi penurunan nilai beban sebesar 14,45 persen pada tahun 2024. Hal ini terjadi karena adanya penurunan pada Beban terkait Pandemi COVID-19, Beban Barang Non Operasional, Beban Langganan Daya dan Jasa, Beban Jasa Konsultan, Beban Jasa Profesi, dan Beban Jasa Lainnya.

Terdapat perbedaan nilai antara Belanja-LRA dengan Beban-LO per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih
Beban Barang Operasional	45.604.115.505	45.358.126.404	245.989.101
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-
Beban Barang Non Operasional	55.827.477.261	55.552.551.762	274.925.499
Beban Langganan Daya dan Jasa	10.597.193.620	10.555.013.020	42.180.600
Beban Jasa Konsultan	137.186.381.289	136.887.870.292	298.510.997
Beban Sewa	97.049.056.081	90.398.504.200	6.650.551.881
Beban Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	9.545.235.718	9.491.175.718	54.060.000
Beban Jasa Profesi	8.449.086.059	8.449.086.059	-
Beban Jasa Lainnya	227.637.454.328	212.212.034.161	15.425.420.167
Beban Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-
Jumlah	591.895.999.861	568.904.361.616	22.991.638.245

Perbedaan nilai sebesar Rp22.991.638.245,00 disebabkan karena perbedaan metode pencatatan dimana Belanja-LRA menggunakan *Cash Basis* sementara Beban-LO menggunakan *Akrual Basis*. Penjelasan atas selisih per jenis beban adalah sebagai berikut:

1. Selisih nilai Beban Barang Operasional sebesar Rp245.989.101,00 berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas Beban Barang Operasional yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024;
2. Selisih nilai Beban Barang Non Operasional sebesar Rp274.925.499,00 berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas Beban Barang Non Operasional yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024;
3. Selisih nilai Beban Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp42.180.600,00 berasal dari koreksi jurnal penyesuaian atas Beban Langganan Daya dan Jasa yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024;

4. Selisih nilai Beban Jasa Konsultan sebesar Rp298.510.997,00 berasal dari jurnal penyesuaian atas Beban Jasa Konsultan yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024 berdasarkan selisih antara Surat Perintah Membayar (SPM) RPATA Penampungan dengan SPM RPATA Pembayaran;
5. Selisih nilai Beban Sewa sebesar Rp6.650.551.881,00 berasal dari jurnal penyesuaian atas Beban Sewa yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024;
6. Selisih nilai Beban Fasilitas Sewa Rumah sebesar Rp54.060.000,00 berasal dari jurnal penyesuaian atas Beban Fasilitas Sewa Rumah yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024;
7. Selisih nilai Beban Jasa Lainnya sebesar Rp15.425.420.167,00 berasal dari jurnal penyesuaian atas Beban Jasa Lainnya yang secara riil diakui sebagai beban di Tahun 2024 serta selisih atas penampungan dan pembayaran RPATA.

D.5 Beban Pemeliharaan

Belanja
Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.873.066.245 00 dan Rp17.718.756.735,00, dengan rincian:

Tabel D.5.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/(turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.814.415.035	10.023.188.825	(12,06)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	464.467.743	358.314.213	29,63
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.790.202.567	6.442.048.036	(10,12)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	610.685.500	815.810.249	(25,14)
Beban Pemeliharaan Lainnya	193.295.400	64.979.400	197,47
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	14.416.012	(100,00)
Jumlah	15.873.066.245	17.718.756.735	(10,42)

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Belanja-LRA dengan Beban-LO pada akun Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024.

(Dalam Rupiah)

Uraian	Belanja-LRA	Belanja-LO	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.814.415.035	8.814.415.035	0
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	464.467.743	464.467.743	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.790.202.567	5.790.202.567	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	610.685.500	610.685.500	0
Beban Pemeliharaan Lainnya	193.295.400	193.295.400	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	15.873.066.245	15.873.066.245	0

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp202.175.321.588,00 dan Rp203.840.036.292,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.6.

PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN PERJALANAN DINAS T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/(turun)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	134.350.276.148	121.877.863.352	10,23
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	67.825.045.440	81.962.172.940	(17,25)
Jumlah	202.175.321.588	203.840.036.292	(0,82)

Bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023, Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengalami peningkatan sebesar 24,34 persen. Sebaliknya, Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri mengalami penurunan signifikan, yaitu sebesar 17,24 persen. Secara keseluruhan, pada T.A. 2024 terdapat penurunan pada Beban Perjalanan Dinas sebesar 0,82 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada T.A. 2023.

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Belanja-LRA dengan Beban-LO per 31 Desember 2024.

(Dalam Rupiah)

Uraian	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	134.350.276.148	134.350.276.148	0
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	67.825.045.440	67.825.045.440	0
Jumlah	202.175.321.588	202.175.321.588	0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban
Barang untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.347.090,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.7.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/(turun)
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	1.347.090	(100,00)
Jumlah	0	1.347.090	(100,00)

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp91.521.216.230,00 dan Rp62.967.177.011,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.8.
PERBANDINGAN RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/(turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	28.684.281.540	26.269.597.095	9,19
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.210.193.836	13.095.614.885	8,51
Beban Penyusutan Jaringan	123.797.493	123.797.493	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	76.597.362	76.597.362	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	51.875.625	49.586.250	4,62
Beban Amortisasi <i>Software</i>	48.240.528.516	23.351.983.926	106,58
Beban Amortisasi Lisensi	133.941.858	-	100
Jumlah	91.521.216.230	62.967.177.011	45,35

D.9 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan
Non
Operasional

Rincian Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel D.9.
PERBANDINGAN RINCIAN KEGIATAN NON OPERASIONAL T.A. 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023	% naik/(turun)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	147.889.999	(100,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	3.841.653.213	19.662.459.303	(80,46)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	29.004.250	66.301.532	(56,25)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	7.834.288.600	8.219.984.991	(4,69)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	34.585.897	(100,00)
Beban Persediaan Rusak/Usang	424.532.381	-	100,00
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	243.692.820	-	100,00
Beban Lain-lain	2.762	1.603	72,30
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	3.353.411.674	(11.193.698.487)	129,96

1. Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp3.841.653.213,00 berasal dari hibah keluar aset tetap peralatan dan mesin berupa 3 (tiga) unit Bus Listrik.
2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp29.004.250,00 merupakan pengembalian atas pembayaran belanja pegawai pada Tahun 2023 yang disetorkan ke kas negara di Tahun 2024.
3. Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp424.532.381,00 merupakan pencatatan atas persediaan yang antara lain berupa kertas, map, amplop, cap, dan ATK lain yang telah usang akibat perubahan nomenklatur Kementerian Investasi/BKPM menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
4. Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp243.692.820,00 berasal dari oleh:
 - a. Beban sebesar Rp23.002.380,00 yang ditimbulkan atas transaksi pembayaran menggunakan mata uang asing atas pekerjaan Sewa Ruangan Indonesia Pavilion pada *World Economic Forum* (WEF) Davos, berupa selisih antara nilai pada saat diterbitkan SPM sebesar Rp5.940.364.635,00 dengan nilai pada saat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp5.963.367.015,00.
 - b. Beban sebesar Rp220.690.440,00 yang ditimbulkan akibat koreksi atas nilai Deposit sewa kantor IIPC T.A. 2024 berdasarkan temuan pemeriksaan BPK R.I. atas penggunaan kurs, yang semula menggunakan kurs pada tanggal transaksi menjadi kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
5. Beban Lain-Lain sebesar Rp2.762,00 merupakan beban yang berasal dari selisih kurs atas bunga bank pada rekening IIPC.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.288.895.571.531,00 dan Rp2.311.419.950.932,00.

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Surplus/Defisit LO Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(1.119.645.884.482,00) dan Rp(1.107.374.626.982,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Transaksi Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sama sebesar Rp0,00.

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp98.990.825,00

E.5 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian kembali Aset Tetap yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018 dan hasil perbaikan pada Tahun 2019. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama masing-masing sebesar Rp0,00.

E.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(316.903.265,00) dan Rp(433.022.763,00). Koreksi ini berasal dari Transaksi Koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp(316.903.265,00) disebabkan oleh:

1. Koreksi pencatatan atas pekerjaan Renovasi Toilet Rooftop Gedung Parkir Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang semula dicatat pada Gedung Kantor Permanen NUP 1 dikoreksi menjadi Bangunan Parkir Tertutup Permanen NUP 1.
2. Koreksi pencatatan atas Asrama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang semula dicatat pada 1 NUP dikoreksi menjadi 21 NUP.

E.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(419.143.824,00) dan Rp37.261.500,00. Koreksi lain-lain sampai dengan 31 Desember 2024 berasal dari:

1. Koreksi perhitungan nilai piutang bukan pajak atas gaji induk a.n. Usamah Widiatmoko yang semula sebesar Rp4.556.800,00 dikoreksi menjadi sebesar Rp3.631.800,00 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor 44/B.3/A.3/2024 tanggal 15 Februari 2024 sehingga menimbulkan koreksi sebesar Rp(925.000,00).
2. Koreksi atas nilai Deposit IIPC per 31 Desember 2023 sebesar Rp(418.218.824,00), berdasarkan temuan pemeriksaan BPK R.I. atas penggunaan kurs, yang semula menggunakan kurs pada tanggal transaksi menjadi, menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

E.8 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.143.436.403.131,00 dan Rp1.085.147.018.019,00. Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN. Rincian transaksi antar entitas pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.147.741.865.665
Diterima dari Entitas Lain	(8.442.627.534)
Pengesahan Hibah Langsung	4.137.165.000
JUMLAH	1.143.436.403.131

E.8.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima Dari Entitas Lain/Ditagihkan Ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp1.147.741.865.665,00 sedangkan DDEL sebesar Rp(8.442.627.534,00).

E.8.2 Pengesahan Hibah Langsung

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat transaksi pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp4.137.165.000,00 yang berasal dari pencatatan penerimaan aset berupa 3 (tiga) unit Bus Listrik pada Satker Sekretariat Utama berdasarkan:

1. Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Nomor S-30/PR.8/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penerbitan Register Nomor 2M3BS2DA (Hibah Barang Berupa Tiga Bus Listrik dari Anhui Jianghui Automobile Group Corp., Ltd kepada Satker Sekretariat Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk Program *Green Transportation Vehicles* di Indonesia); dan
2. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor 814877515884328195 Tanggal 23 Januari 2024.

E.9 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.311.950.043.091,00 dan Rp2.288.895.571.531,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pengembalian Tanah dan Bangunan oleh Pensiunan Kementerian Investasi dan Hilirisasi a.n. Said Ridwan

Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengirimkan surat Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Nomor 1091/A.3/B.3/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang pemberitahuan atas status kepemilikan rumah dinas yang berlokasi di Jalan Bima Raya Nomor 120 Depok. Sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kemudian melakukan pemasangan plang di halaman rumah dinas yang menyatakan bahwa rumah tersebut merupakan aset negara yang dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa status kepemilikan rumah dinas tersebut diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan aset negara. Selanjutnya, pada pertengahan bulan Februari 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menerima pengembalian kunci rumah dinas, menandai penyelesaian proses pengembalian aset negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Catatan Penting Lainnya atas Laporan Realisasi Anggaran

a. Capaian Output Strategis K/L

Selama Tahun Anggaran 2024 *output* strategis yang telah dicapai oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah sebagai berikut:

- 1) Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal untuk T.A. 2024 adalah sebesar Rp1.714,2T yaitu 103,9% dari target Presiden sebesar Rp1.650T, serta 132,54,3% dari target Renstra sebesar Rp1.293,3T. Adapun realisasi investasi ini meningkat sebesar 20,8% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder untuk TA. 2024 adalah sebesar Rp205,5T atau 45,4% dari total Penanaman Modal Asing

(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder merupakan realisasi penanaman modal sektor sekunder yang diraih baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di luar migas, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan usaha kecil. Adapun ruang lingkup sektor sekunder meliputi:

1. Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
 2. Industri Makanan;
 3. Industri Kimia dan Farmasi;
 4. Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi lain;
 5. Industri Kertas dan Percetakan;
 6. Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam;
 7. Industri Tekstil;
 8. Industri Karet dan Plastik;
 9. Industri Mineral Non-Logam;
 10. Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki;
 11. Industri Kayu; dan
 12. Industri Lainnya
- 3) Capaian Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (Di Luar Jawa) untuk TA. 2024 adalah sebesar Rp859,4T. Penanaman Modal Berkualitas ditetapkan dalam rangka mengejar pemerataan ekonomi khususnya untuk wilayah di luar Jawa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas investasi untuk mencapai pemerataan yang ditujukan terhadap wilayah-wilayah di luar Jawa;
- 4) Capaian Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM untuk TA. 2024 adalah sebesar Rp814T atau 47,5% dari total realisasi penanaman modal. Adapun capaian PMDN ini mengalami peningkatan sebesar 20,6% dibandingkan realisasi yang sama pada TA. 2023;
- 5) Pada tahun 2021, secara resmi diumumkan pemberhentian penerbitan laporan EoDB dan adanya rencana penyusunan pendekatan baru yang dijadikan sebagai parameter penilaian iklim investasi bagi pelaku usaha. Sejak tahun 2022 peringkat kemudahan berusaha di Indonesia mengacu pada *World Competitiveness Yearbook 2023* yang diterbitkan Institute for Management Development (IMD). Dalam *World Competitiveness Yearbook 2023*, indeks daya saing kemudahan berusaha Indonesia mengalami peningkatan yang semula berada di peringkat 44 di Tahun 2022, menjadi peringkat 34 di tahun 2023 dari total 64 negara di seluruh dunia. Dan ditahun

2024 menjadi peringkat 27. Selain IMD, evaluasi target dilanjutkan melalui survei IMD dan B-Ready yang memiliki metodologi yang berbeda;

- 6) Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk TA. 2024 adalah 71,91 dengan peringkat "BB" (Baik), yaitu 89,88% dari target 80 dengan peringkat "A" (Sangat Baik); dan
- 7) Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM TA. 2023 yang dikeluarkan di Tahun 2024 memperoleh opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini atas Laporan Keuangan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

b. Capaian Output per Fungsi APBN

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diklasifikasikan ke dalam 1 fungsi yaitu fungsi Ekonomi (04). Capaian *output* utama per Fungsi APBN dijabarkan dalam **Lampiran 7** laporan keuangan ini.

c. Capaian Output per Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pagu anggaran PN yang dikelola Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah sebesar Rp458.987.353.000,00 dengan total realisasi sebesar Rp441.100.105.706,00, sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 8** laporan keuangan ini.

Catatan Penting Lainnya atas Neraca

Pada bagian Aset Lain-lain yang dimiliki oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) per tanggal 31 Desember 2024, terdapat deposit sewa ruang kantor perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di luar negeri, *Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)*, sebesar Rp6.493.763.715,00 yang masih berada pada pihak pemilik Gedung. Pelaksanaan pembayaran atas sewa kantor dimaksud dilakukan secara tahunan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, dalam Surat Perjanjian Sewa yang telah disepakati antara kedua belah pihak, juga telah ditetapkan masa sewa yang mencakup rincian lebih lanjut mengenai periode sewa serta ketentuan lain yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait penggunaan ruang kantor. Dalam Perjanjian Sewa telah ditetapkan masa sewa dengan rincian sebagai berikut:

No	Pemilik Gedung (Lessor)	IIPC (Lessee)	Periode Kontrak	
			Mulai	Berakhir
1	Fukoku Mutual Seimei Insurance Company	Tokyo, Jepang	1 Juni 2024	31 Mei 2027
2	Suntec Real Estate Investment Trust	Singapura	15 Mei 2025	30 Juni 2028
3	Servcorp Administration Services Ltd	Abu Dhabi, UEA	1 April 2022	31 Maret 2025
4	Sherwood 370 Lexington LLC (d/h)	New York, USA	1 April 2021	31 Mei 2026
5	Landmark Space Limited	London, Inggris	1 Januari 2025	31 Desember 2025
6	Dexus Property Group	Sydney, Australia	1 Januari 2025	31 Desember 2027
7	SIFC Tower One Development YH	Seoul, Korea Selatan	13 Januari 2024	12 Januari 2027

Jakarta, **09 MAY 2025**

Menteri Investasi dan Hilirisasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Rosan Perkasa Roeslani



**MINISTRY OF INVESTMENT AND DOWNSTREAM INDUSTRY/
INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD**



Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)

Investasi Tumbuh, Indonesia Maju

Jl. Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190